



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partai politik hadir sebagai elemen demokratisasi sekaligus menjadi sarana bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Dalam negara yang bersistem demokrasi seperti Indonesia, keberadaan partai politik menjadi suatu hal yang sangat penting karena melalui partai politik setiap warga negara dapat mengaspirasikan gagasan dan pemikirannya untuk berkontribusi membangun sebuah negara, sehingga bisa dikatakan bahwa partai politik merupakan bagian representasi dari warga negara tersebut.

Di Indonesia, partai politik sudah ada sejak zaman pemerintahan orde lama pada tahun 1955, saat itu merupakan pesta demokrasi yang dilakukan pertama kali oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah sejarah bagi masyarakat Indonesia, karena saat itulah di mulainya awal sebuah pembelajaran tentang demokrasi.

Peserta pemilu pada saat itu diikuti oleh lebih dari 28 partai politik dengan lima partai yang jumlah suara yang terbanyak yaitu Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode, Pada periode pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR (dewan

permusyawaratan rakyat). Kemudian pada periode kedua 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante.

Tidak kurang dari 80 calon dari partai politik, organisasi masyarakat, dan puluhan perorangan ikut serta dalam pencalonan ini (*Sejarah pemilu, 2014*).



Gambar 1.1 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1955

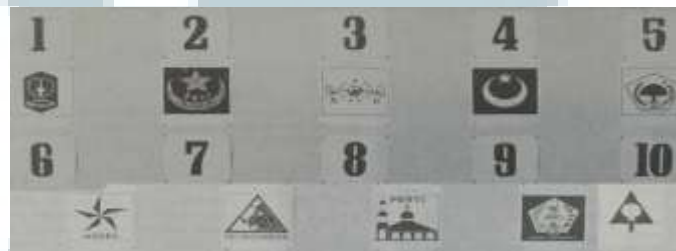
Sumber : [www.ceritamu.com/cerita/pemilu-indonesia](http://www.ceritamu.com/cerita/pemilu-indonesia)

Pada Maret tahun 1956 parlemen terbentuk dengan jumlah anggota sebanyak 272 orang. Ada 17 fraksi yang mewakili 28 lebih partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang (*Sejarah pemilu, 2014*).

Selanjutnya, kondisi politik Indonesia setelah pemilu tahun 1955 banyak terjadi berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Pasca pemilu tahun 1955 banyak terjadi kekisruhan

atau insiden yang dikenal dengan kejadian G30/S PKI (gerakan 30 September partai komunis Indonesia) pada tahun 1966. Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia sejak tahun 1945 akhirnya turun dari jabatan presiden, maka berakhir era kepemimpinan Soekarno yang disebut sebagai zaman orde lama. Pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan oleh MPR Sementara sebagai Presiden Indonesia (*Sejarah pemilu, 2014*).

Era kepemimpinan Soeharto disebut sebagai zaman orde baru. Tiga tahun memerintah Indonesia, Soeharto akhirnya menggelar pemilu kedua pada 5 Juli 1971. Ini adalah pemilu pertama setelah orde lama atau pemilu pertama di zaman orde baru. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik dengan lima besar partai pemenang pemilu yaitu Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (*Sejarah pemilu, 2014*).



Gambar 1.2 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1971

Sumber : [www.scientistofsocial.com](http://www.scientistofsocial.com)

Hal baru yang menarik pada pemilu tahun 1971 adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara bersikap netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 dimana para pejabat negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon

partai secara formal. Namun dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu yaitu Golongan Karya. Pada saat itu terjadi rekayasa politik yang dilakukan pemerintahan orde baru yaitu sejumlah kebijakan yang dilakukan demi menguntungkan salah satu pihak yaitu Golongan Karya (*Sejarah pemilu*, 2014).

Setelah pemilu (pemilihan umum) tahun 1971 yang diikuti 10 konstestan, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, undang-undang baru ini mengatur soal penggabungan partai politik yang sebelumnya ada sembilan partai politik kemudian diperkecil jumlahnya menjadi hanya dua. Partai-partai beraliran islam bergabung dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, partai-partai di luar islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai tersebut bersaing dengan Golongan Karya dalam setiap pemilu pada masa orde baru (*Sejarah pemilu*, 2014).

Setelah pemilu (pemilihan umum) tahun 1971 ada lima pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim orde baru, yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lima pemilu tersebut berlangsung yang hanya diikuti oleh dua partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu selalu dimenangkan oleh Golongan Karya. Selama periode orde baru masyarakat Indonesia memilih partai dalam setiap pemilu, lalu partai menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di DPR (dewan permusyawaratan rakyat), semua anggota DPR adalah anggota MPR (majelis permusyawaratan rakyat) kemudian MPR bermusyawarah untuk menunjuk seorang

presiden dan meraka selalu menunjuk Soeharto sebagai presiden. (*Sejarah pemilu, 2014*).

Pemilu tahun 1999 merupakan awal baru demokrasi Indonesia dibangun kembali. Penguasa Orde Baru Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan dari rakyat Indonesia. BJ Habibie yang semula adalah wakil presiden naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum melakukan seleksi dan meloloskan 48 partai politik. Golkar yang semula bukan partai pada tahun tersebut berubah menjadi partai politik. Ada lima besar partai pemenang pemilu pada saat itu (*Sejarah pemilu, 2014*).

Tabel 1.1 Perolehan Lima Besar Suara Partai Politik Tahun 1999

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.689.073	33,74	153
2	Partai Golkar	23.741.749	22,44	120
3	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	10,71	58
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	12,61	51
5	Partai Amanat Nasional	7.528.956	7,12	34

Sumber : [www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa](http://www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa)

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai pemenang pemilu, namun ketua umum partai Megawati Soekarnoputri gagal menjadi presiden. Karena di zaman itu presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Musyawarah di MPR memutuskan dan mengangkat Abdurrahman Wahid

dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai presiden dengan Megawati sebagai wakil presiden (*Sejarah pemilu*, 2014).

Pemilu (pemilihan umum) tahun 2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih secara langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden serta wakil presiden. Sebelumnya rakyat hanya memilih partai politik saja pada saat pemilu dan calon anggota DPR dipilih oleh partai sedangkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR (majelis permusyawaratan rakyat). Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua bagian yang berbeda yaitu pemilu (pemilihan umum) legislatif dan pemilu presiden (*Sejarah pemilu*, 2014).

Pemilu (pemilihan umum) legislatif dilakukan pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden. Hasil lima besar pemilu (pemilihan umum) legislative tahun 2004:

Tabel 1.2 Perolehan Lima Besar Suara Partai Politik Tahun 2004

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57

Sumber : [www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa](http://www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa)

Selanjutnya pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2009 dilakukan pada tanggal 9 April dan diikuti oleh 44 partai politik. Ribuan calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan banyak kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk pertama kalinya menggunakan sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009. Melalui sistem ini pemilih tidak hanya bisa memilih partai politik, melainkan juga bisa memilih caleg (calon legislatif) yang sesuai dengan calon yang bisa mewakilinya di parlemen. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut (*Sejarah pemilu*, 2014).

Tabel 1.3 Perolehan Sepuluh Besar Suara Partai Politik Tahun 2009

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1.	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	148
2.	Partai Golkar	15.037.757	14,45%	106
3.	PDI-P	14.600.091	14,03%	94
4.	PKS	8.206.955	7,88%	57
5.	PAN	6.254.580	6,01%	46
6.	PPP	5.533.214	5,32%	38
7.	PKB	5.146.122	4,94%	19
8.	Partai Gerindra	4.646.406	4,46%	26
9.	Partai Hanura	3.922.870	3,77%	17
10.	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%	0

Sumber : [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)



Sebanyak 121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangi pemilu legislatif tahun 2009 dengan memperoleh 21.703.137 suara atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos ambang batas partai politik (*parlementary threshold*) yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 2,5 persen, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Hanura (*Sejarah pemilu, 2014*).

Pemilu legislatif tahun 2014 di laksanakan pada 9 April 2014 dan diikuti oleh 14 partai politik. Ribuan calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR-RI, 132 kursi DPD, dan banyak kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh yang lolos verifikasi yang ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).



Gambar 1.3 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

Sumber : [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)

Pada pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2014 terdapat banyak caleg (calon legislatif) yang mengikuti proses pemilu legislatif yaitu sebanyak 6.607 orang caleg (calon legislatif) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka akan saling berkompetisi untuk memperebutkan 560 kursi yang ada DPR-RI dari 77 dapil (daerah pemilihan) yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah komposisi profil caleg (calon legislatif) DPR-RI berdasarkan jenis kelamin dari 12 partai politik nasional (Deytri, 2013).



Gambar 1.4 Komposisi Profil Caleg DPR-RI Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : [www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa](http://www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa)

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa caleg (calon legislatif) DPR-RI dari 12 partai politik nasional periode 2014-2019 memiliki jenis kelamin laki-laki sebesar 62,6 persen yang mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan jumlah caleg (calon legislatif) yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 37,4 persen, jika

dibandingkan dengan caleg (calon legislatif) DPR-RI periode 2009-2014 yang memiliki jenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pada caleg (calon legislatif) perempuan periode 2014-2019 sebesar 3,4 persen dan penurunan jumlah caleg (calon legislatif) laki-laki periode 2014-2019 sebesar 2,4 persen. Karena memang Komisi Pemilihan Umum mewajibkan semua partai politik memasukkan nama daftar caleg (calon legislatif) perempuan minimal 30 persen untuk keterwakilan perempuan di setiap dapil (daerah pemilihan). Kemudian berikut adalah komposisi profil caleg (calon legislatif) DPR-RI berdasarkan usia dari 12 partai politik nasional.



Gambar 1.5 Komposisi Profil Caleg DPR-RI Tahun 2014 Berdasarkan Usia

Sumber : [www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa](http://www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa)

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa caleg (calon legislatif) DPR-RI dari 12 partai politik nasional memiliki usia 21-30 tahun sebesar 9.5 persen, 31-50 tahun

sebesar 56,6 persen, dan usia diatas 50 tahun sebesar 34 persen, Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa caleg (calon legislatif) dari 12 partai politik nasional di dominasi oleh caleg yang memiliki usia produktif yaitu 31 sampai 50 tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan caleg (calon legislatif) DPR-RI periode 2009-2014 untuk caleg yang memiliki usia 21-30 tahun menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah pada caleg (calon legislatif) periode 2014-2019 sebesar 3,1 persen dan untuk caleg yang memiliki usia 31-50 tahun juga mengalami penurunan jumlah pada caleg (calon legislatif) periode 2014-2019 sebesar 3 persen, kemudian untuk caleg yang memiliki usia diatas 50 tahun terjadi peningkatan jumlah pada caleg (calon legislatif) periode 2014-2019 sebesar 6,1 persen. Kemudian berikut adalah komposisi profil caleg (calon legislatif) DPR-RI berdasarkan pendidikan dari 12 partai politik nasional.



Gambar 1.6 Komposisi Profil Caleg DPR-RI Tahun 2014 Berdasarkan Pendidikan

Sumber : [www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa](http://www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa)

Berdasarkan gambar 1.6 terlihat bahwa caleg (calon legislatif) DPR-RI dari 12 partai politik nasional periode 2014-2019 mayoritas memiliki tingkat pendidikan Sarjana/S1 yaitu sebesar 51,2 persen, diikuti dengan Master/S2 sebesar 24,3 persen, SLTA sebesar 11,6 persen, Doktor/S3 sebesar 5,3 persen, dan Diploma/D3 sebesar 2,4 persen. Apabila dibandingkan antara caleg (calon legislatif) periode 2009-2014 dengan caleg (calon legislatif) periode 2014-2019 yang memiliki pendidikan SLTA mengalami penurunan sebesar 4,5 persen, Diploma/D3 mengalami penurunan sebesar 2,8 persen, dan Sarjana/S1 mengalami penurunan sebesar 6 persen, sedangkan yang memiliki pendidikan tingkat Master/S2 mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen, dan Doktor/S3 mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen. Kemudian berikut adalah komposisi profil caleg (calon legislatif) DPR-RI berdasarkan profesi dari 12 partai politik nasional.



Gambar 1.7 Komposisi Profil Caleg DPR-RI Tahun 2014 Berdasarkan Profesi

Sumber : [www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa](http://www.indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa)

Berdasarkan gambar 1.7 terlihat bahwa caleg (calon legislatif) DPR-RI dari 12 partai politik nasional periode 2014-2019 sebagian besar memiliki profesi sebagai swasta dan bisnis yaitu sebesar 48,6 persen, kemudian diikuti profesi sebagai politisi sebesar 12,1 persen, professional sebesar 9,5 persen, akademisi sebesar 7,5 persen, pensiunan sebesar 4,8 persen, pejabat pemerintah sebesar 2 persen, artis sebesar 0,6 persen, tokoh agama sebesar 0,3 persen, ibu rumah tangga sebesar 0,1 persen, dan tidak ada data sebesar 14,5 persen. Jika dibandingkan antara caleg (calon legislatif) periode 2009-2014 dengan caleg (calon legislatif) periode 2014-2019 dimana caleg yang memiliki profesi sebagai swasta dan bisnis mengalami penurunan sebesar 22,6 persen, dan profesi sebagai ibu rumah tangga mengalami penurunan sebesar 1,3 persen, sedangkan untuk caleg yang memiliki profesi sebagai politisi mengalami peningkatan sebesar 5,4 persen, diikuti dengan profesi sebagai profesional peningkatan sebesar 2,5 persen, profesi akademisi mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen, profesi pejabat pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1,1 persen, profesi artis mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen, kemudian untuk profesi tokoh agama dan pensiunan jumlahnya tidak mengalami perubahan, masing-masing yaitu 0,3 persen dan 4,8 persen.

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 Mei 2014 yang telah melakukan rekapitulasi suara secara nasional, Sesuai keputusan KPU nomor 411/kpts/KPU/2014 maka didapat hasil resmi suara dan jumlah kursi partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2014 sebagai berikut (Herudin, 2014)

Tabel 1.4 Perolehan Dua Belas Besar Suara Partai Politik Tahun 2014

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1.	PDIP	23.681.471	18,95	109
2.	Golkar	18.432.312	14,75	91
3.	Gerindra	14.760.371	11,81	73
4.	Demokrat	12.728.913	10,19	61
5.	PKB	11.298.957	9,04	47
6.	PAN	9.481.621	7,59	49
7.	PKS	8.480.204	6,79	40
8.	Partai Nasdem	8.402.812	6,72	35
9.	PPP	8.157.488	6,53	39
10.	Hanura	6.579.498	5,26	16
11.	PBB	1.825.750	1,46	0
12.	PKPI	1.143.094	0,91	0

Sumber : [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa ada 10 partai politik yang lolos ke parlemen dengan menempatkan mereka meraih kursi di DPR-RI. Kesepuluh partai tersebut mampu melewati ambang batas partai politik (*parlementary threshold*) yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 3,5 persen untuk bisa lolos ke parlemen, sedangkan untuk dua partai lainnya yang tidak bisa melewati ambang batas parlemen maka mereka tidak dapat mengirimkan perwakilannya ke DPR-RI.

Jika diamati pada pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2009 dan pemilihan umum legislatif tahun 2014 diantara para partai politik yang berkompetisi untuk memenangi pemilu, ada partai politik yang mampu memperoleh suara yang secara signifikan yang menempatkan dirinya berada di tiga besar pada pemilu tahun 2014 dimana sebelumnya pada pemilu legislatif tahun 2009 hanya berada dalam urutan 8 besar kemudian pada pemilu legislatif 2014 mampu memperoleh suara terbanyak ke 3 diantara 10 besar partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2014 dan partai tersebut ialah Partai Gerindra.

Kemunculan Partai Gerindra terbilang sangat singkat, sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum legislatif, yakni pada 6 februari 2008. Dalam deklarasi tersebut tertulis visi, misi, dan *manifesto* perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan pancasila sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 (*Partai Gerindra, 2014*).

Salah satu faktor yang melatarbelakangi didirikannya Partai Gerindra adalah sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dianggap semakin melemah. Bahkan menurut para inisiator Partai Gerindra upaya yang dilakukan para pemegang kebijakan dalam membangun bangsa justru salah arah sehingga masuk ke dalam arus ekonomi pasar, maka yang terjadi adalah kemunduran sistem perekonomian dan kehidupan masyarakat yang menjadi lebih sulit. Oleh karena itu,



mendirikan sebuah partai politik oleh para elit Partai Gerindra menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan (*Partai Gerindra*, 2014).

Pokok-pokok perjuangan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra mencakup beberapa sektor yang menjadi fokus perhatian Partai Gerindra di antaranya adalah di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, pertanian, perikanan, sumber daya alam, energi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan hukum. Dengan adanya fokus perhatian terhadap sektor-sektor tersebut, maka berbagai macam masalah sosial di Indonesia tentunya akan bisa diatasi (*Partai Gerindra*, 2014).

Meskipun keberadaan Partai Gerindra masih cukup baru di kancah perpolitikan nasional, namun Partai Gerindra memiliki perhatian yang besar terhadap perubahan sistem pendekatan dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan yang dilakukan Partai Gerindra adalah dengan mengganti pendekatan *neo-liberal* dengan pendekatan ekonomi kerakyatan (Hasist, 2013).

Gagasan ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Partai Gerindra diterapkan kedalam sebuah program yang diberi nama dengan 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra yang di deklarsikan pada 15 Juli 2013. Program ini dibuat sebagai bentuk dari orientasi usaha yang dibangun Partai Gerindra untuk memperoleh kepercayaan dari rakyat dan menunjukkan bahwa Partai Gerindra adalah partai politik yang secara terbuka dan transparan mempublikasikan semua program kerja, kegiatan, dan prioritas pembangunan yang jelas dan terukur yang akan dilakukan apabila memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 (*Deklarasi transformasi*, 2013).

Partai Gerindra pada pemilu (pemilihan umum) legislatif 2014 juga memfokuskan kemenangan pemilu dengan memperkuat para caleg (calon legislatif) DPR-RI yang akan mengikuti proses pemilu legislatif tahun 2014, dimana Partai Gerindra menyiapkan 558 caleg (calon legislatif) DPR-RI yang tersebar di 77 dapil (daerah pemilihan). Partai Gerindra menyiapkan para calon legislatif berkualitas yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, berpengalaman, dan merupakan tokoh yang dikenal masyarakat. Caleg (calon legislatif) DPR-RI Partai Gerindra sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Sarjana/S1 sebesar 53,1 persen, kemudian sebagian caleg (calon legislatif) juga bergelar Master/S2 sebesar 30,5 persen dan yang lain bergelar Doktor/S3 sebesar 6,7 persen. Porsi caleg (calon legislatif) yang berpendidikan tinggi pada Partai Gerindra lebih terlihat dibandingkan dengan partai lain. Adapun caleg (calon legislatif) berpendidikan SLTA sebesar 8,6 persen dan Diploma/D3 sebesar 1,1 persen yang justru jumlahnya semakin sedikit dibandingkan caleg (calon legislatif) pada periode sebelumnya. Kemudian dari segi usia caleg (calon legislatif) DPR-RI Partai Gerindra sebagian besar berusia 31-50 tahun yaitu sebesar 50 persen, diikuti dengan caleg (calon legislatif) yang memiliki usia diatas 50 tahun sebesar 30,5 persen, dan sisanya ialah caleg (calon legislatif) yang memiliki usia 21-30 tahun sebesar 19,5 persen diantaranya, seperti Afnaan Mahdi Alatas berusia 22 tahun dari dapil (daerah pemilihan) Kalimantan Timur dan Dyanisa Wahyu Nigrum berusia 23 tahun dari dapil (daerah pemilihan) Jawa Tengah VII, dan Ade Rizki Pratama berusia 26 tahun dari dapil (daerah pemilihan) Sumatra Barat II. Selain itu caleg (calon legislatif) DPR-RI Partai Gerindra juga diisi oleh beberapa calon yang memiliki pengalaman yang cukup baik dalam dunia politik,

seperti Fadli Zon dari dapil Jabar V, Ahmad Muzani dari dapil Lampung I, dan Biem Triani Benjamin dari dapil DKI II, serta terdapat juga para caleg (calon legislatif) DPR-RI Partai Gerindra yang merupakan bagian dari *public figure* seperti Bondan Winarno dari dapil DKI II, Rachel Maryam dari dapil Jabar II dan Jamal Mirdad dari dapil Jateng I (Polmark Indonesia, 2015).

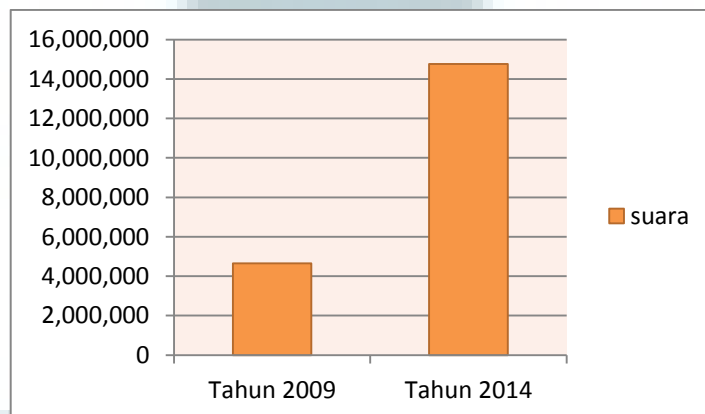
Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014 mendapat kepercayaan dari publik yang sangat tinggi dimana berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh Indonesia *Survey Center* (ISC) yang menyatakan bahwa Partai Gerindra dipersepsikan sebagai partai yang paling bersih dari kasus korupsi (16,7 persen), diikuti oleh Hanura (12,2 persen), selain itu Partai Gerindra juga dianggap oleh masyarakat sebagai partai yang paling konsisten mendukung pemberantasan korupsi yang ada di negara Indonesia (Faqih, 2014).

Pada lembaga survei lainnya, yaitu Indonesia *Network Election Survey* (INES) menyatakan bahwa Partai Gerindra merupakan partai yang paling bersih dari korupsi karena sangat sedikit kadernya yang terlibat kasus korupsi dan bisa dikatakan Partai Gerindra adalah partai yang paling anti korupsi, sebagian besar rakyat Indonesia memilih Partai Gerindra karena dinilai bersih dan anti korupsi dan dianggap mampu menyalurkan aspirasi rakyat (*Survei INES*, 2014).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency Intenational* Indonesia (TII) terkait dengan tingkat transparansi keuangan partai politik di DPR-RI, indeks transparansi tertinggi diraih oleh Partai Gerindra yang dinyatakan sebagai

partai yang paling transparan mengelola keuangan partai. Transparansi adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi, selain itu transparansi merupakan faktor penting untuk membentuk partai politik modern yang sehat dan kuat ditengah sikap skeptis publik terhadap partai politik. Hasil survei tersebut menunjukkan pada publik bahwa masih ada sejumlah partai politik yang transparan dalam hal keuangan. Maka dengan begitu Partai Gerindra terus berusaha berkomitmen dalam menjaga transparansi publik (Transparency Intenational Indonesia, 2013)

Pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2014 merupakan untuk kedua kalinya Partai Gerindra menjadi kontestan politik di pentas nasional. Berkat kerja keras para elit partai, caleg (calon legislatif) DPR-RI dan DPRD, para kader dan simpatisan. Partai Gerindra mampu untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mendapatkan respon positif pada pemilu legislatif tahun 2014, dimana Partai Gerindra meraih peningkatan perolehan suara di tahun 2014 yang sangat signifikan.



Gambar 1.8 Perolehan Suara Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009-2014

Sumber : [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa pada pemilu legislatif tahun 2009 Partai Gerindra yang saat itu merupakan untuk pertama kalinya menjadi peserta pemilu, mampu memperoleh suara sebanyak 4.646.406 suara. Pada pemilu legislatif tahun 2009 baru diterapkan sistem *parlementary threshold* atau disebut juga dengan ambang batas parlemen, peraturan ini mengatur perolehan suara partai politik dengan membatasi minimal suara harus 2,5 persen dari total jumlah suara sah secara nasional, jika partai politik mampu mencapai perolehan suara 2,5 persen atau lebih maka partai tersebut berhak mendapatkan kursi di DPR-RI. Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2009 mampu melampaui ambang batas dengan memperoleh 4,46 persen suara dari seluruh total jumlah suara sah, dengan hasil tersebut Partai Gerindra berhak mendapatkan 26 kursi di DPR-RI.

Kemudian pada tahun 2014 Partai Gerindra mengikuti kembali proses pemilu (pemilihan umum) legislatif yang diadakan setiap 5 tahunan. Pada pemilu legislatif tahun 2014, suara Partai Gerindra menunjukkan *tren* perolehan yang meningkat secara signifikan dengan memperoleh suara sebanyak 14.760.371 suara, sehingga menempatkan Partai Gerindra sebagai partai politik yang memperoleh suara terbanyak ke-3 setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang menempati posisi satu dan dua. Pada pemilu tahun 2014 partai politik diharuskan mampu untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen agar bisa lolos ke parlemen, dimana Partai Gerindra pada pemilu kali ini memperoleh suara 11,81 persen dari jumlah total suara sah sehingga Partai Gerindra berhak mendapatkan 73 kursi di DPR-RI.

Peningkatan perolehan jumlah kursi legislatif yang diperoleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014 merupakan bukti riil kekuatan Partai Gerindra pada pemilu legislatif kali ini, dimana Partai Gerindra mampu menambah jumlah kursi yang diperoleh di DPR-RI sebanyak 73 kursi. Jumlah ini merupakan prestasi yang luar biasa sebagai partai yang baru berdiri selama 6 tahun dan sekaligus menempatkan Partai Gerindra pada posisi strategis dalam persaingan antar partai politik.

## **1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Perkembangan dunia politik di Indonesia yang sangat dinamis dan memiliki persaingan kompetisi yang kuat untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia maka semakin memperketat persaingan antar partai politik dan persaingan antar kandidat partai politik pada arena-arena politik. Realitas seperti ini menuntut hampir semua institusi partai politik dan para caleg (calon legislatif) untuk turun secara langsung ke masyarakat. Partai politik dan para caleg (calon legislatif) harus memiliki sebuah terobosan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat agar mendapat dukungan pada saat pemilu (pemilihan umum) berlangsung.

Partai Gerindra melalui program andalannya yaitu 6 Program Aksi Transformasi Bangsa, dimana program tersebut memiliki kualitas program yang baik, jelas, dan terukur. Berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan menjalankan 6 Program Aksi Transformasi Bangsa. Isi program tersebut yaitu pertama, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan

energi serta pengamanan sumber daya air. Keempat, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia, melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Keenam, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Program yang ditawarkan merupakan salah satu kontrak politik Partai Gerindra kepada rakyat Indonesia apabila memenangkan pemilu legislatif 2014.

Pada pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2014, Partai Gerindra memperkuat para caleg (calon legislatif) DPR-RI dengan menyiapkan para calon legislatif yang berkualitas, yaitu mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, berpengalaman, dan merupakan tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Dengan adanya caleg (calon legislatif) yang berkualitas yang diusung oleh Partai Gerindra, maka hasil dari pemilu legislatif tahun 2014 nantinya juga akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang bisa memenuhi harapan rakyat serta merubah negara Indonesia menjadi lebih baik. Wakil rakyat yang baik dan berkualitas adalah mereka yang mengerti serta mampu melaksanakan tugas dengan baik dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat.

Partai Gerindra memiliki komitmen dan sikap yang tegas terhadap adanya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh Partai Gerindra melalui komitmennya dalam transparansi publik, dimana Partai Gerindra mendapat penghargaan dari Komisi Infomasi Pusat (KIP) sebagai partai politik yang paling transparan dan kooperatif dalam hal proses pendanaan partai terhadap publik. Sistem

pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Gerindra mendapat kepercayaan dari publik yang tinggi karena dari sejak awal didirikan Partai Geindra memiliki komitmen keterbukaan terhadap publik (Susila dan Ansyari, 2014).

Sebagai partai politik yang berkompetisi pada pemilu (pemilihan umum) legislatif tahun 2014, dimana hal ini memang tidak mudah bagi Partai Gerindra untuk bisa berkompetisi dengan partai lain yang lebih berpengalaman dan sudah lama mengikuti pemilu legislatif. Namun jika dilihat dari perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2009 dimana pada saat itu satu tahun sebelumnya baru resmi didirikan dan merupakan untuk pertama kalinya Partai Gerindra mengikuti proses pemilu legislatif, Partai Gerindra berhasil memperoleh 26 kursi di DPR-RI dan menempatkan Partai Gerindra dalam urutan 8 suara terbanyak secara nasional di tahun 2014. Kemudian pada pemilu legislatif tahun 2014 mengikuti kembali proses pemilu legislatif untuk kedua kalinya, Partai Gerindra mampu menambah perolehan kursi sebanyak 73 kursi di DPR-RI dan terjadi peningkatan perolehan suara yang signifikan yang berhasil menempatkan Partai Gerindra ke dalam urutan 3 besar suara terbanyak secara nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra mampu untuk bersaing dalam kompetisi memperebutkan perolehan kursi DPR-RI di antara partai politik yang besar dan berpengalaman dalam mengikuti pemilu legislatif. Keadaan ini tidak lepas dari respon positif para pemilih terhadap 6 Program Aksi Transformasi Bangsa yang dapat



diterima dengan baik dan respon positif terhadap caleg (calon legislatif) DPR-RI Partai Gerindra yang membuat para pemilih tertarik untuk mendukung dan memilihnya pada pemilu legislatif tahun 2014. Selain itu kerja keras Partai Gerindra dalam membangun citra positif sebagai partai yang bersih dan anti korupsi juga menjadi bahan pertimbangan bagi para pemilih untuk mendukung Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka bisa dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Partai Gerindra dalam pemilu legislatif tahun 2014. Pertama, Partai Gerindra memiliki kualitas program yang baik, jelas, dan terukur. Kedua, caleg (calon legislatif) DPR-RI Partai Gerindra diisi oleh orang-orang yang berkualitas, berpengalaman, dan merupakan tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Ketiga, Partai Gerindra mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia karena memiliki komitmen terhadap transparansi publik dan sikap yang tegas terhadap adanya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Literatur *political marketing* berpendapat bahwa partai politik yang ingin menguasai pemerintahan perlu mengubah apa yang mereka tawarkan yaitu sebuah produk politik dalam hal ini ialah program yang ditawarkan harus sesuai dengan tuntutan pasar. *Market orientation* dalam politik telah menjadi subjek penelitian yang signifikan karena menawarkan pendekatan yang berpotensi membawa kesuksesan dalam *winning elections* (Marshment, 2009).

*Positioning* bagi calon kandidat dari sebuah partai politik merupakan aspek penting dari proses *political marketing* karena strategi yang digunakannya untuk

menetapkan kebijakan partai yang berlaku untuk mengajak para pemilih agar mendukung calon kandidat dari partai politik pada saat sebelum dan sesudah pemilu (Baines, Harris, Lewis, 2002).

*Image* politik dalam hal ini bisa berupa reputasi dan kredibilitas dari partai politik yang dipersepsikan oleh masyarakat luas. Semakin baik reputasi dan kredibilitas suatu partai politik maka semakin besar peluang untuk dipilih masyarakat dalam pemilihan umum. *Image* politik yang positif dari suatu partai politik akan memberikan efek yang positif pula terhadap pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Cangara, 2007 dalam Wirman, 2014).

Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang pengaruh *market orientation*, *candidate positioning*, dan *party's good image* terhadap *successful political marketing*. Maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Market Orientation, Candidate Positioning dan Party's Good Image Terhadap Successful Political Marketing: Telaah Pada Partai Gerindra”**.

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *market orientation* memiliki pengaruh terhadap *successful political marketing*?
2. Apakah *candidate positioning* memiliki pengaruh terhadap *successful political marketing*?
3. Apakah *party's good image* memiliki pengaruh terhadap *successful political marketing*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, yaitu:

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh *market orientation* terhadap *successful political marketing*.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh *candidate positioning* terhadap *successful political marketing*.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh *party's good image* terhadap *successful political marketing*.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup berdasarkan variable dan pemilihan konteks penelitian. Pembatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Variable yang digunakan berjumlah 4 variable, yaitu *market orientation*, *candidate positioning*, *party's good image*, *successful political marketing* (Khatib, 2012). Peneliti tidak mengikut sertakan 2 variable yang ada di jurnal utama yaitu *conducting marketing research* dan *market segmentation and targeting* karena variable tersebut memiliki keterbatasan dalam indikator pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.
- 2 Responden dalam penelitian ini adalah para pemilih yang memilih Partai Gerindra pada Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2014 yaitu mereka yang mencoblos pada kolom nama caleg (calon legislatif) DPR-RI dari Partai Gerindra ataupun mereka yang mencoblos bagian kolom lambang Partai

Gerindra dan kolom nama caleg (calon legislatif) DPR-RI dari Partai Gerindra. Responden juga bukan merupakan orang yang terdaftar dalam kepengurusan struktural di Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Responden mengetahui 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Serta responden pernah mengakses media sosial Partai Gerindra.

- 3 Penyebaran kuesioner dilakukan secara *offline* dengan kuesioner cetak.
- 4 Penelitian ini dilakukan dalam rentan waktu September 2014 – Januari 2015.
- 5 Peneliti menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 19.0 untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada *pretest*. SPSS digunakan karena SPSS mampu menganalisis data dengan jumlah responden kurang dari 100 tanpa melakukan *bootstrap*
- 6 Analisis terhadap *test* dilakukan dengan SEM (*Structural Equation Modeling*). Peneliti menggunakan SEM dengan *software* AMOS (*Analysis Moment of Structure*) versi 19.0 untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas hingga uji hipotesis pada penelitian.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat akademis

Dapat memberikan kontribusi potensial informasi dan referensi kepada pembaca mengenai ilmu pemasaran, khususnya dalam hal pengaruh *market orientation, candidate positioning, party's good image* terhadap *successful political marketing* yang di telaah pada Partai Gerindra.

## 2. Manfaat kontribusi praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran, informasi, pandangan, wawasan, bahan pertimbangan dan saran yang berguna bagi sebuah partai politik khususnya Partai Gerindra sehingga mengetahui dan memahami pentingnya konsep *market orientation*, *candidate positioning*, dan *party's good image* yang menjadi faktor-faktor penting untuk tercapainya *successful political marketing*

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu pembahasan atas pokok permasalahan yang lebih mendalam. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang yang memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini, tujuan dari dibuatnya penelitian ini yang akan dicapai, dan manfaat yang diharapkan serta terdapat sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi mengenai landasan-landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan variable *market orientation*, *candidate positioning*, *party's good image* dan *successful political marketing*.

Selanjutnya dari konsep tersebut akan dirumuskan hipotesis dan akhirnya terbentuk suatu kerangka penelitian teoritis yang melandasi penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu dan model penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum objek, metode yang digunakan, desain penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengambilan data, serta teknik analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum dari objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa profil responden dan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Hasil dari kuesioner tersebut akan dihubungkan dengan teori yang terkait dalam bab dua.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari peneliti yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang dapat ditetapkan selanjutnya.